

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2011) mendefinisikan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebagai suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2011 Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat menjadi KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. Dari definisi tersebut, bisa dilihat bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) itu:

1. Badan Usaha – KAP adalah sebuah organisasi (bukan seseorang atau sesuatu), entah itu berbentuk perseorangan atau persekutuan atau firma atau bentuk badan usaha lain.
2. Didirikan oleh Akuntan Publik – KAP didirikan oleh seorang Akuntan Publik (bila badan usahanya berbentuk perseorangan) atau beberapa orang Akuntan Publik (bila badan usahanya berbentuk persekutuan). Anggota sekutu dalam KAP berbentuk persekutuan disebut “Rekan”.
3. Memberikan Jasa Asuransi – Sama seperti Akuntan Publik, KAP juga menyediakan jasa asuransi. Hanya saja bertindak atas nama organisasi.
4. Menggunakan Nama Pendirinya – Sebuah KAP selalu menggunakan nama pendirinya. Bila badan usahanya berbentuk perseorangan, maka otomatis nama KAP nya sama dengan nama pendirinya yang sudah pasti seorang Akuntan Publik. Bila badan usahanya berbentuk persekutuan, maka nama KAP nya menggunakan nama salahseorang pendirinya yang juga seorang Akuntan Publik.
5. Memperoleh Ijin Usaha – Ini yang paling penting, sebuah KAP harus mengantongi ijin usaha KAP.

Di dalam KAP terdapat akuntan publik. Akuntan publik sendiri menurut UU No. 5 Tahun 2011 adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU No.5 tahun 2011) tentang Akuntan Publik. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan. IAI merupakan anggota *International Federation of Accountants* (IFAC). IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri *ASEAN Federation of Accountants* (AFA). Saat ini IAI menjadi sekretariat permanen AFA (<http://iaiglobal.or.id>)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung dengan jumlah 26 Kantor Akuntan Publik yang masing-masing KAP berjumlah 5 orang auditor sebagai responden. Alasan penulis memilih Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung sebagai objek penelitian karena KAP di Wilayah Bandung mendapat peringkat kedua setelah DKI Jakarta dari keseluruhan total KAP yang terdaftar di Indonesia yang berjumlah 492 KAP (www.iapi.or.id). Tahun penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 sehingga dapat memperkuat dan melengkapi penelitian terdahulu.

1.2 Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat dan memiliki penilaian yang bebas yang tidak memihak pada manajemen perusahaan atas informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi laporan audit menjadi berkualitas diantaranya adalah independensi dan kompetensi. Independensi dan kompetensi auditor dipandang berkaitan dengan kualitas audit baik dengan proses maupun hasil audit.

Independensi menurut Arens et al (2012) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak biasa. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independence*

in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak biasa sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Menurut Tuanakotta (2011) kompetensi merupakan keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu (Arens et al, 2012).

Menurut De Angelo dalam Tjun-tjun et.al (2012) mendefinisikan kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan yang relevan.

Dengan begitu, kualitas auditor ditentukan oleh independensi dan kompetensi. Auditor akan dikatakan kompeten atau ahli jika dapat menemukan pelanggaran dan auditor dikatakan independen jika dapat melaporkan pelanggaran tersebut dengan baik. Kemampuan auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi akan meningkatkan reputasinya sehingga auditor diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Auditor independen dituntut eksistensinya dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan memberikan pendapat atas dasar hasil pemeriksaan, sehingga keterlibatannya penting dalam penentuan kualitas audit. Tingginya kualitas audit merupakan suatu jaminan bahwa laporan keuangan telah secara tepat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Namun di dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan dalam

pelaksanaan audit. Salah satu yang sering terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi kesalahan laporan keuangan berarti Kantor Akuntan Publik belum menerapkan prinsip etika profesi akuntan. Akhir-akhir ini terdapat fenomena menurunnya kualitas audit. Pada beberapa kasus, auditor tidak dapat menemukan kecurangan dalam laporan keuangan atau kecurangan tersebut ditemukan oleh auditor tetapi tidak dilaporkan, misalnya Kasus Hambalang.

Pada kasus Hambalang menyebutkan permasalahan yaitu draft hasil pemeriksaan audit berbeda dengan laporan audit yang dikeluarkan. Menurut Ruki selaku ketua Tim Pemeriksa Audit Investigasi oleh BPK menyebutkan bahwa pada laporan audit pertama ada diagram yang menggambarkan aliran dana proyek Hambalang yang melibatkan Kementerian Olahraga serta sejumlah perusahaan kontraktor dan subkontraktor seperti PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Duta Sari Citra Laras. Namun ternyata didalam bagian kesimpulan laporan audit investigasi Hambalang tidak ada nama-nama yang seharusnya tercantum, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (AM), Manajemen dari PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Duta Sari Citra Laras.

”Inilah yang menjadi persoalan. Kalau sudah menjadi temuan, seharusnya juga disebutkan dalam kesimpulan laporan audit,” kata Ruki. Menurut Ruki, sebagai Menteri, AM tentu mengetahui banyak tentang proyek Hambalang sehingga harus bertanggung jawab atas terjadinya berbagai penyimpangan dalam proyek tersebut. Ruki, menilai laporan audit investigasi BPK mengenai proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, telah diintervensi. Pasalnya, dalam laporan tersebut, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat. Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Ruki, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.

”Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-

perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut,” kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu kepada Kompas, Senin (24/2), di Jakarta.

Selain itu BPK menemukan penyimpangan antara lain surat palsu terkait tanah untuk proyek itu, penggelembungan dana proyek dari sekitar Rp 200 Milyar menjadi Rp 2,4 triliun yang tidak sesuai spesifikasi dan peruntukannya, perubahan penganggaran proyek menjadi tahun jamak, dan mengalirnya uang muka proyek ke sejumlah perusahaan kontraktor. Berdasarkan kasus tersebut Ruki menyebut adanya sejumlah kemungkinan. Pertama tim auditor tidak memiliki bukti-bukti keterlibatan Menpora dan perusahaan kontraktor tersebut dalam penyelewengan dana proyek Hambalang. Namun, kemungkinan ini sangat kecil mengingat pada berkas hasil pemeriksaan sudah ditemukan indikasi keterlibatan mereka. Kemungkinan kedua, adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap para auditor namun belum diketahui siapa pihak yang mengintervensi dan siapa auditor yang diintervensi. (www.nasional.kontan.co.id, 25 Februari 2014).

Menurut penulis dalam fenomena penelitian dalam Kasus Hambalang, Tim Pemeriksa Audit Investigasi dari BPK yang mengaudit Kasus Hambalang mempunyai kesalahan mengenai kualitas audit yang mereka hasilkan dalam laporannya. Kesalahan laporan audit tersebut yaitu, draft hasil pemeriksaan audit berbeda dengan laporan audit yang dikeluarkan yang berisi laporan yang menyebutkan bahwa pada laporan audit pertama ada diagram yang menggambarkan aliran dana proyek Hambalang yang melibatkan Kementerian Olahraga serta sejumlah perusahaan kontraktor dan subkontraktor. Namun ternyata di dalam bagian kesimpulan laporan audit tim auditor investigasi Hambalang yang dibentuk oleh BPK tidak ada nama-nama yang seharusnya tercantum, yakni Kementerian Olahraga serta sejumlah perusahaan kontraktor dan subkontraktor. Sehingga hal ini membuat Ruki selaku ketua Tim Pemeriksa Audit Investigasi oleh BPK enggan untuk menandatangani laporan audit tersebut sebelum laporan tersebut di perbaiki. Dari fenomena tersebut disimpulkan bahwa independensi auditor dari tim auditor investigasi BPK dipertanyakan kejujuran dan independennya karena menurut ketua tim auditor investigasi BPK ada kemungkinan yang menyebutkan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap para auditor namun belum diketahui siapa pihak

yang mengintervensi dan siapa auditor yang diintervensi sehingga independensi auditor yang dimiliki tim auditor awal tersebut dianggap minim dalam membuat laporan audit yang berkualitas.

Dalam hal kompetensi berupa pengetahuan dan pengalaman dari fenomena diatas, menurut penulis kompetensi Tim Pemeriksa Audit Investigasi dari BPK mencerminkan bahwa mereka tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam membuat laporan audit yang berkualitas, sebab seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam kasus hambalang, Tim Pemeriksa Audit Investigasi dari BPK tidak mengikuti perkembangan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga kompetensi mereka dianggap tidak memadai.

Menurut Arens et al. (2012) untuk melakukan audit harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Dalam audit atas laporan keuangan historis oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), kriteria yang berlaku biasanya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Penelitian yang dilakukan pada KAP di Tangerang, Rudi & Nera (2010) menyimpulkan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas audit dan profesionalisme, kompetensi dan independensi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian Tjun Tjun et al (2012) mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Dimana keahlian diproksikan dengan pengalaman dan pengetahuan, sedangkan independensi diproksikan dalam lama ikatan dengan klien, tekanan dari klien dan telaah dari rekan auditor dan jasa non audit. Hasil dari penelitiannya bahwa kualitas audit yang terdiri pengetahuan dan pengalaman yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, berbeda dengan hasil independensi, bahwa hubungan dengan klien, tekanan dari klien,

telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tjun, Indrawati & Setiawan (2012), penelitiannya mengenai “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit” (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta). Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjun Tjun dkk yang menjadi variabel independen adalah independensi dan kompetensi, dan variabel dependen yang diambil adalah kualitas audit. Hasil dari penelitiannya adalah independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Dita & Made (2014) tentang Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang) menunjukkan bahwa pengalaman, pengetahuan auditor, dan tekanan dari rekan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien dan pemberian jasa non audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Kualitas audit saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena hasil audit digunakan oleh banyak pihak dan digunakan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Independensi Auditor dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Bandung)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Di dalam melaksanakan suatu aktivitas audit, auditor dituntut dapat mencerminkan kompetensinya untuk klien dengan profesional yang tinggi. Selain dituntut harus memiliki kompetensi yang tinggi, seorang auditor dituntut pula untuk memiliki independensi yang tinggi agar tidak mudah dipengaruhi oleh klien. Dengan demikian ia tidak dibenarkan untuk memihak salah satu klien. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur dan independen tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Banyak pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik menjadi semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun di dalam negeri. Hal itu dikarenakan kualitas audit saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena hasil audit digunakan oleh banyak pihak dan digunakan untuk mengambil keputusan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan peneliti yang diusulkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana independensi auditor, kompetensi auditor dan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung ?
2. Bagaimana pengaruh independensi auditor dan kompetensi auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung ?
3. Bagaimana pengaruh independensi auditor secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung ?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menemukan empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui independensi auditor, kompetensi auditor dan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
2. Untuk mengetahui independensi auditor dan kompetensi auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung.
3. Untuk mengetahui independensi auditor berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung.

4. Untuk mengetahui kompetensi auditor berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi dan akademisi sebagai berikut:

1. Praktisi

- a. Penelitian ini memberikan pandangan mengenai pengaruh independensi auditor dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Wilayah Bandung.
- b. Memberikan tambahan informasi terhadap auditor untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.
- c. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya.

2. Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian dibidang auditing dalam materi perkuliahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain di bidang audit.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ada beberapa penelitian tentang kualitas audit yang telah dilakukan baik dari segi topik maupun metode penelitian. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Dita & Made (2014). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah pada Dita & Made dalam penelitiannya menggunakan sampel Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Malang. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung. Tahun penelitian pada kasus ini juga berbeda, penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 sehingga dapat memperkuat dan melengkapi penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan

sampel auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung sebanyak 26 Kantor Akuntan Publik yang masing-masing KAP berjumlah 5 orang auditor sebagai responden.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, perlu dibuat sistematika penulisan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

